



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMMAD RUDY SALAHUDDIN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
3. NHK : 162657

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 52.434.562.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/331 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 13.060.450.000
2. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 12.500.000
3. Tanah Seluas 853 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 285.755.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1189 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 36.543.647.000
5. Bangunan Seluas 4.58 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 672.210.000
6. Bangunan Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.860.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 720.900.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1974, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 50.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 465.900.000



4. MOTOR, HONDA - Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOTOR, HONDA - Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. MOBIL, TOYOTA DX Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	835.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.514.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.300.033.765
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.585.671.768
Sub Total	Rp.	62.390.867.533
III. HUTANG	Rp.	69.444.441
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	62.321.423.092

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.